

**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
TA 2023**

AUDITED



018.09.2400.567783.000.KD
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
JL. TIMOR RAYA KM.32 NAIBONAT,
KUPANG TIMUR, KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP NTT adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP NTT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP NTT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kupang, 31 Desember 2023
Kepala BPSIP NTT



Dr. Ir. Sophia Rarnawati, S.P.
NIP. 196704181994032001

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	14
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	18
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	24
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	29
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Neraca Perbandingan per 31 Desember 2023
2. Neraca Percobaan Saldo Awal Januari 2023
3. Neraca Percobaan AkruaI per 31 Desember 2023
4. Neraca Percobaan Kas per 31 Desember 2023
5. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023
6. Laporan Operasional per 31 Desember 2023
7. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023
8. Laporan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid per 31 Desember 2023
9. Laporan Posisi BMN pada Neraca per 31 Desember 2023
10. Laporan Posisi BMN pada Neraca Saldo Awal 1 Januari 2022
11. Laporan Pendapatan berdasarkan Akun per 31 Desember 2023
12. Berita Acara Stok Opname Persediaan
13. Surat Hasil Rekon
14. Berita Acara Rekon Internal

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP NTT yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si †
NIP. 196704181994032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP NTT Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Anggaran untuk Pendapatan Negara pada periode Semester II TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 261.398.262,00 atau mencapai 94% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp277.500.000,00

Realisasi Anggaran untuk Belanja pada periode Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp 11.897.570.392,00 atau mencapai 98% dari alokasi anggaran sebesar Rp 12.192.167.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp366.191.658.206,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.200.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp366.100.068.714,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp89.544.209,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp22.695.702,00 dan Rp366.168.962.504,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp256.156.212,00; jumlah beban adalah sebesar Rp14.284.183.067,00; jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp12.202.050,00; Surplus/Defisit – LO (Rp14.015.824.805,00).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp368.548.615.179,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp14.015.824.805,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 (NIHIL) dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.636.172.130,00, sehingga Ekuitas entitas periode 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 366.168.962.504,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSIP NTT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.				
Pendapatan Perpajakan	B.1.1	0,00	0,00	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	277.500.000,00	261.398.262,00	94	322.551.379,00
Pendapatan Hibah	B.1.3	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Pendapatan		277.500.000,00	261,398,262,00	94	322.551.379,00
BELANJA NEGARA					
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.726.216.000,00	6.711.188.840,00	98	8,918,962,498,00
Belanja Barang	B.2.2	5.465.951.000,00	5.186.383.333,00	99	3.802.670.787,00
Belanja Modal	B.2.3	0,00	0,00	0	667,410,000,00
Jumlah Belanja Negara		12.192.167.000,00	11.897.570.392,00	98	12,509,062,728,00

II. NERACA

**BPSIP NTT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET LANCAR	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	0.00	0.00
Persediaan	C.1.2	1.200.000,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		1,200,000.00	0,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1.	334.639.404.000,00	334.639.404.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	13,593,958,923.00	13,638,201,923,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	41,030,292,690,00	41,030,292,690,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2,944,213,634.00	2,944,213,634,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	68.824.025,00	68,824,025,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(26,176,624,558.00)	(23,843,513,016.00)
Jumlah Aset Tetap		366,100,068,714.00	368,477,423,256.00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	17.573.573,00	17.573.573,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	393,152,478.00	348,909,478.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(321,181,842.00)	(273,440,709.00)
Jumlah Aset Lainnya		89,544,209.00	93,042,342.00
Jumlah Aset		366,183,071,561.00	368,570,465,598.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0.00	21.850.419.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.2.	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		(7,741,362.00)	21,850,419.00
Jumlah Kewajiban		(7,741,362.00)	21,850,419.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	366,190,812,923.00	368,548,615,179.00
Jumlah Ekuitas		366,190,812,923.00	368,548,615,179.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		366,183,071,561.00	368,570,465,598.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPSIP NTT LAPORAN
OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	256,156,212.00	314.251.360,00
JUMLAH PENDAPATAN		256.156.212,00	314.251.360,00
BEBAN OPERASIONAL	D.2.		
Beban Pegawai	D.2.1	6,721,478,059.00	8.011.921.709,00
Beban Persediaan	D.2.2	5.760.000,00	186.204.500,00
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	2,603,274,330.00	2.179.405.542,00
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.119.190.862,00	1.077.138.066,00
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.442.396.722,00	499.922.656,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	2.380.852.675,00	2.464.017.794,00
JUMLAH BEBAN		14,272,952,648.00	14,284,183,067.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14,016,796,436.00)	(14,104,358,907.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.	12,202,050,00	8,300,019,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		12,202,050.00	8,300,019.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		(14,004,594,386.00)	(14,096,058,888.00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPSIP NTT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	368.548.615.179,00	370.375.044.376,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(13,993,974,386.00)	-14,096,058,888.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	96.950.000,00
Koreksi nilai persediaan	E.3.1.	0,00	96.950.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	11,636,172,130.00	12,172,679,691.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(2,357,802,256.00)	-1,826,429,197.00
EKUITAS AKHIR	E.6	366,190,812,923.00	368,548,615,179.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP NTT

BPSIP NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP NTT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP NTT

dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP NTT yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP NTT adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari beberapa pos dan dibagi sesuai dengan jenis belanjanya. Pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran yang ditampilkan merupakan jenis belanja yang dianggarkan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Selama periode berjalan, BPSIP NTT telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan belanja sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	277,500,000.00	277,500,000.00
Jumlah Pendapatan	276.935.000,00	276.935.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.841.489.000,00	6,726,216,000.00
Belanja Barang Operasional	1,294,884,000.00	1,224,042,000.00
Belanja Barang Non Operasional	354,501,000.00	1,027,471,000.00
Belanja Barang Persediaan	32,400,000.00	0,00
Belanja Jasa	282,000,000.00	526,800,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,026,116,000.00	1,121,958,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	414,600,000.00	1,565,680,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
Jumlah Belanja	11,245,990,000.00	12,192,167,000.00

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 261,398,262.00 atau mencapai 94% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 277,500,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Perpajakan	0,00	0.00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	277.500.000,00	261.398.262,00	94
Pendapatan Hibah	0,00	0.00	0
Jumlah	277,500,000,00	261.398.262,00	94

B.1.1 PENDAPATAN PERPAJAKAN

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 (NIHIL) dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 0 (NIHIL).

B.1.2 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 261,398,262.00 atau mencapai 94% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 277,500,000.00. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSIP NTT sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	65,000,000	118,860,000	0	118,860,000	182.86
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	3,449,800	0	3,449,800	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,468,212	0	16,468,212	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	65,000,000	138,778,012	0	138,778,012	213.5
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	18,732,000	0	18,732,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	0	18,732,000	0	18,732,000	
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	212,500,000	98,646,200	0	98,646,200	46.42
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	212,500,000	98,646,200	0	98,646,200	46.42
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,242,050	0	5,242,050	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	5,242,050	0	5,242,050	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	277,500,000	261,398,262	0	261,398,262	94.2
	JUMLAH PENDAPATAN	277,500,000	261,398,262	0	261,398,262	94.2

B.1.3 PENDAPATAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Hibah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 (NIHIL) dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 0 (NIHIL).

B.2 BELANJA NEGARA

Belanja Negara yang BPSIP NTT masuk dalam Belanja Pemerintah Pusat. Realisasi Belanja Negara BPSIP NTT pada periode Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp11.897.570.392,00 atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp12.192.167.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		6,726,216,000.00	6,711,187,059.00	99,75
Belanja Barang		5,465,951,000.00	5,186,383,333.00	95
Belanja Modal		0.00	0.00	0.00
Total Belanja Kotor		12,192,167,000.00	11,897,570,392.00	98
Pengembalian Belanja		-	1,781.00	-
Total Belanja		12,192,167,000.00	11,897,570,392.00	97,58

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.711.187.059,00 dan Rp 8.013.401.725,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 16,25% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja karena terdapat transformasi lembaga yang menyebabkan jumlah pegawai berkurang sebanyak 15 pegawai;
2. Terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti sebanyak 10 orang dan pegawai aktif meninggal dunia sebanyak 1 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,711,188,840.00	8.013.401.725,00	(16,25)
Jumlah Belanja Kotor	6,711,188,840.00	8.013.401.725,00	(16,25)
Pengembalian Belanja Pegawai	1.781,00	0,00	-
Jumlah Belanja Netto	6.711.187.059,00	8.013.401.725,00	(11,54)

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5,186,383,333.00 dan Rp 3.814.419.345,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 35,97%% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kegiatan tambahan dari DPR RI untuk bimbingan teknis pertanian di provinsi Nusa Tenggara Timur

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,211,394,441.00	1,236,351,787.00	-2,02
Belanja Barang Non Operasional	1,211,394,441.00	663,510,618.00	82,57
Belanja Barang Persediaan	0,00	79,500,000.00	-100,00
Belanja Jasa	470,107,793.00	258,679,218.00	81,73
Belanja Pemeliharaan	1,119,190,862.00	1,078,538,166.00	3,77
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,442,396,722.00	499,922,656.00	188,52
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0.00	0.00	
Jumlah Belanja Kotor	5.186.383.333,00	3.816.502.445,00	35,97
Pengembalian Belanja Barang	0.00	13,831,658.00	(100,00)
Jumlah Belanja Netto	5.186.383.333,00	3.802.670.787,00	35,97

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp667.410.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 belum berjalan pada semester II 2023.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	667.410.000,00	(100)
Jumlah Belanja Kotor	0,00	667.410.000,00	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Netto	0,00	667.410.000,00	(100)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di lainnya dan setara kas merupakan uang tunai di tangan Bendahara dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Rincian sumber Kas di Bendahara adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022

C.1.2. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 dan Rp0,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Bahan Baku	1.200.000,00	0,00
Jumlah	1.200.000,00	0,00

Tidak terdapat anggaran Belanja Persediaan pada DIPA TA 2023, realisasi belanja persediaan per 31 Desember 2023 diperoleh melalui perolehan lainnya dari benih hasil panen kegiatan penanaman tahun anggaran yang lalu.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP NTT per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp334.639.404.000,00 dan Rp334.539.404.000,00. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan nilai Tanah selama periode Semester II TA 2023. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Aset
A. Saldo Awal	334.639.404.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	333.316.120.000
Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	1.294.900.000
Tanah sawah irigasi	28.384.000
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	334.639.404.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin dalam Neraca yang dimiliki BPSIP NTT 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.593.958.923,00 dan Rp13.638.601.923,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
A. Saldo Awal	13.638.601.923,00	13,638,201,923
B. Mutasi Tambah	0	0
C. Mutasi Kurang	(44.243.000,00)	0
Penghentian Penggunaan	(44.243.000,00)	
Saldo Akhir	13.593.958.923,00	13.638.201.923,00
Akumulasi Penyusutan	(11.995.694.350,00)	(11.370.116.555,00)
Nilai Buku	1.598.264.573,00	2.268.085.368,00

Terdapat mutasi kurang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penghentian Penggunaan peralatan dan mesin karena rusak berat dengan total nilai Rp 44.243.000,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan dalam Neraca yang dimiliki BPSIP 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 41,030,292,690.00 dan Rp 41,030,292,690.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
A. Saldo Awal	41.030.292.690,00	40.562.882.690,00
B. Mutasi Tambah	0	109.981.000,00
C. Mutasi Kurang	0	0
Saldo	41.030.292.690,00	40.672.863.690,00
Akumulasi Penyusutan	(11.575.844.167,00)	(9.931.345.033,00)
Nilai Buku	29.454.448.523,00	30.741.518.657,00

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan pada Aset Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Neraca yang dimiliki BPSIP NTT 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.944.213.634,00 dan Rp2.944.213.634,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
A. Saldo Awal	2.944.213.634,00	2.944.213.634,00
B. Mutasi Tambah	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0
Saldo	2.944.213.634,00	2.944.213.634,00
Akumulasi Penyusutan	(1.448.217.653,00)	(1.309.367.194,00)
Nilai Buku	1.495.995.981,00	1.634.846.440,00

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2023.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya dalam Neraca yang dimiliki BPSIP NTT per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp68.824.025,00 dan Rp68.824.025,00. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan untuk Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2023

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca yang dimiliki BPSIP NTT per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca yang dimiliki BPSIP NTT per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-Rp26.176.624.558,00 dan Rp23.843.513.016,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Saldo	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.593.958.923,00	(11.995.694.350,00)	1.598.264.573,00
2.	Gedung dan Bangunan	41.030.292.690,00	(11.575.844.167,00)	29.454.448.523,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.944.213.634,00	(1.448.217.653,00)	1.495.995.981,00
4.	Aset Tetap Lainnya	68.824.025,00	0,00	68.824.025,00
Akumulasi Penyusutan		57.637.289.272,00	-25.019.756.170,00	32.617.533.102,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.573.573,00 dan Rp17.573.573,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain dalam Neraca yang dimiliki BPSIP NTT 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp393.152.478,00 dan Rp349.205.909,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSIP NTT serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi Penambahan sampai dengan 30 Juni 2023 senilai Rp 44.243.000,00 yaitu berupa 12 NUP peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya. Sedangkan untuk nilai diluar neraca terdapat penambahan 6 NUP peralatan dan mesin ekstrakomptabel yang dihentikan penggunaannya.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP NTT 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-271.691.643,00 dan Rp-269.942.576,00.

.Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	17.573.573,00	(17.253.573,00)	320.000,00
2.	Aset Lain-lain	393.152.478,00	(302.179.203,00)	90.973.275,00
Total		410.726.051,00	(319.432.776,00)	91.293.275,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp21.850.419,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPSIP NTT per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	329.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	21.521.419,00
Jumlah	0,00	21.850.419,00

Tidak terdapat utang kepada Pihak Ketiga untuk periode 31 Desember 2023.

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp366.190.812.923,00 dan Rp368.548.615.179,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN PERPAJAKAN

D.1.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp297,025,956,00 dan Rp227.621.194,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.449.800,00	0,00	100
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	98,646,200.00	207.221.500,00	-52,40
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	18,732,000.00	14.892.000,00	25,79
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	118,860,000.00	71.230.000,00	66,87
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16,468,212.00	20.907.860,00	-21,23
Jumlah	256.158.212,00	314.251.360,00	-18,49

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 dikarenakan :

1. Setoran PNBPN BPSIP NTT sempat diblokir pada awal periode
2. Musim tanam untuk TA 2023 lebih sedikit dibandingkan TA 2022
3. Berkurangnya pegawai yang menyewa bangunan rumah negara karena purna bakti

D.2. BEBAN OPERASIONAL

D.2.1 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.710.858.059,00 dan Rp8.011.921.709,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.678.431.180,00	5.498.073.880,00	-14,91
Beban Pembulatan Gaji PNS	72.650,00	81.965,00	-11,36
Beban Tunj. Anak PNS	107.220.498,00	129.257.070,00	-17,05
Beban Tunj. Beras PNS	268.243.680,00	319.589.460,00	-16,07
Beban Tunj. Fungsional PNS	239.340.000,00	544.135.000,00	-57,97
Beban Tunj. PPh PNS	13.712.624,00	34.153.626,00	-59,85
Beban Tunj. Struktural PNS	18.900.000,00	23.940.000,00	-21,05
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	342.817.028,00	400.310.708,00	-14,36
Beban Tunjangan Umum PNS	174.695.000,00	185.225.000,00	-5,68
Beban Uang Makan PNS	745.746.000,00	877.155.000,00	-14,98
Beban Uang Lembur	97.940.000,00	0,00	100
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji	-1.781,00	0,00	100
Beban Gaji Pokok PPPK	23.732.000,00	0,00	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	540	0,00	100
Beban Tunj. Anak PPPK	0,00	0,00	100
Beban Tunj. Beras PPPK	869.040,00	0,00	100
Beban Tunj. Fungsional PPPK	2.160.000,00	0,00	100
Beban Tunj. PPh PPPK	0,00	0,00	100
Beban Tunj. Struktural PPPK	0,00	0,00	100
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	1.186.000,00	0,00	100
Beban Tunjangan Umum PPPK	0,00	0,00	100
Beban Uang Makan PPPK	6.142.000,00	0,00	100
Beban Uang Lembur PPPK	271.000,00	0,00	100
Jumlah	6.721.478.059,00	8.011.921.709,00	-16,24

Terdapat penurunan realisasi anggaran beban pegawai dibandingkan periode tahun sebelumnya diakibatkan berkurangnya jumlah pegawai dari periode tahun sebelumnya. Terdapat 10 pegawai yang memasuki masa purna bakti pada Tahun Anggaran 2023. Realisasi LO dan LRA untuk beban pegawai dan belanja pegawai terdapat selisih Rp 329.000,00 karena adanya pembayaran kekurangan gaji di TA 2023 atas kenaikan pangkat pegawai di TA 2022

D.2.2 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.760.000,00 dan Rp186.204.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	5.760.000,00	106.730.000,00	-94,60
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	25.500,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	0,00	77.024.500,00	-100,00
Beban persediaan lainnya	0,00	2.450.000,00	-100,00
Jumlah	5.760.000,00	186.230.000,00	-96,91

D.2.3 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.603.274.330,00 dan Rp2.179.405.542,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.095.362.441,00	1.101.352.065,00	-0,54
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108.432.000,00	116.342.500,00	-6,80
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7.600.000,00	17.999.722,00	-57,78
Beban Bahan	838.468.465,00	164.212.318,00	410,60
Beban Honor Output Kegiatan	99.825.050,00	155.070.000,00	-35,63
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.000.000,00	344.228.300,00	-98,55
Beban Langganan Listrik	192.473.834,00	238.443.887,00	-19,28
Beban Langganan Telepon	29.586.540,00	35.887.450,00	-17,56
Beban Langganan Air	1.926.000,00	5.869.300,00	-67,19
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00
Beban Sewa	115.300.000,00	-	100
Beban Jasa Profesi	109.300.000,00	-	100
Jumlah	2.603.274.330,00	2.179.405.542,00	19,45

D.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.119.190.862,00 dan Rp1.077.138.066,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	527.878.833,00	462.178.710,00	14,22
Beban Pemeliharaan Lainnya	304.481.100,00	304.542.700,00	-0,02
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278.830.929,00	302.397.656,00	-7,79
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	7.993.500,00	0,08
Jumlah	1.119.190.862,00	1.077.112.566,00	3,91

D.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.442.396.722,00 dan Rp 499.922.656,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.242.196.722,00	431.422.656,00	187,93
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.200.000,00	68.500.000,00	192,26
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.442.396.722,00	499.922.656,00	188,52

D.2.6 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.2.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.380.852.675,00 dan Rp 2.464.017.794,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	80.000,00	80.000,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.644.499.135,00	1.640.495.902,00	0,24
Beban Penyusutan Irigasi	52.533.680,00	52.533.679,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.498.553,00	51.151.560,00	-63,84
Beban Penyusutan Jaringan	18.498.553	18.498.552,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.418.133	3.418.133,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	607.642.575	697.839.968,00	-12,93
Jumlah	2.380.852.675,00	2.464.017.794,00	-3,38

D.3. PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 12.202.050,00 dan Rp 8.300.019,00. Rincian Perbandingannya adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.242.050,00	5.300.000,00	-1,09
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.960.000,00	3.000.019,00	132,00
Jumlah	12.202.050,00	8.300.019,00	47,01

Dari kegiatan Operasional yang berlangsung hingga 31 Desember 2023, Suplus/Defisit LO yang diperoleh yaitu senilai (Rp13.993.974.386,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal adalah nilai ekuitas periode 31 Desember 2022 yang menjadi nilai awal per 1 Januari 2023. Nilai ekuitas awal periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 368.548.615.179,00 dan Rp370.375.044.376,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Perubahan ekuitas periode berjalan dipengaruhi oleh Surplus/Defisit LO yang terjadi. Hingga 31 Desember 2023 terdapat Defisit LO senilai Rp 13.993.974.386,00. Defisit LO akan mengurangi jumlah ekuitas awal.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 (NIHIL)

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 (NIHIL).

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 (NIHIL)..

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.636.172.130,00 dan Rp12.172.679.691,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi antar entitas akan menambah ekuitas awal.

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas adalah nilai selisih Defisit LO dengan transaksi antar entitas sampai dengan 31 Desember 2023. Pada periode ini ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp 2.357.802.256, mengalami penurunan lebih besar dari periode sebelumnya 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp 1.826.429.197.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai seluruh jumlah aset yang sudah dikurangi hutang serta kewajiban merupakan nilai akhir ekuitas atau disebut ekuitas akhir. Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp366,190,812,923.00 dan Rp368,548,615,179.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lain-lain

A) Saldo Tidak Normal Periode 12 2023

NO	BAES1	KODE	NAMA SATKER	PERIODE	AKUN	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO NORMAL	KETERANGAN
1	01809	567783	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR	2023-12	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	7,741,362	D	TIDAK NORMAL
2	01809	567783	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR	2023-12	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	7,741,362	0	K	TIDAK NORMAL

Saldo tidak normal pada Neraca disebabkan karena pada saat Bendahara Pengeluaran melakukan input setoran pajak atas pungutan pajak periode Desember TA 2023 disaat yang sama operator GLP telah melakukan tutup buku sementara periode Desember TA 2023.

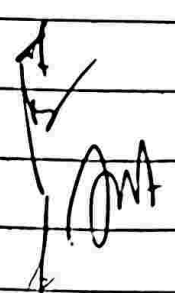
Bendahara Pengeluaran dan Operator GLP BPSIP NTT telah melakukan konsultasi dengan KPPN Kupang terkait permasalahan tersebut. KPPN Kupang telah menyampaikan untuk melakukan penghapusan dan penginputan ulang setoran pajak periode Desember TA 2023 dan memastikan pada saat penginputan di operator GLP tidak melakukan tutup buku periode Desember.

Bendahara Pengeluaran telah melakukan penghapusan dan input ulang setoran pajak atas pungutan pajak periode Desember TA 2023 serta melakukan konfirmasi ke KPPN Kupang. Operator GLP BPSIP NTT bersama dengan mitra KPPN Kupang telah melakukan pengecekan ulang buku besar akun saldo tidak normal yang dimaksud. Berdasarkan hasil pengecekan bersama, perbaikan pencatatan atas saldo tidak normal dinyatakan selesai dilakukan namun dengan catatan masuk dalam periode 13 TA 2023.

B) Daftar Kekurangan dan Kelebihan Tunjangan Kinerja Pegawai Karena Perpindahan Jabatan Fungsional

NO	NAMA	SK MENTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	JABATAN FUNGSIONAL LAMA	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL LAMA	JABATAN FUNGSIONAL BARU	BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BARU	SELISIH PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PER BULAN	SELISIH PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SEPTEMBER 2022 SD DESEMBER 2023 SERTA GAJI KE 13 DAN 14 TAHUN 2023	TELAH DIPOTONG OLEH KEUANGAN SEJAK SEPTEMBER SD NOVEMBER 2023 (UNTUK DI SETOR)	SETOR KE KAS NEGARA (NTPN)	SELISIH BELUM DIPOTONG/ DISETOR
1	Ir. Ati Rubianti, M.S	-	Peneliti Muda	1.750.000	Fungsional Umum	185.000	1.565.000	26.605.000	0	-	26.605.000
							0	0			-
Jumlah				1.750.000	Fungsional Umum	185.000	1.565.000	26.605.000	0	0	26.605.000
2	Haruna, S.Pi.,M.Si	1802/Kpts/Kp.240/A2/08/2022	Peneliti Ahli Pertama	0	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	0	0	0			-
3	Aloysia Doa, S.P	1803/Kpts/Kp.240/A2/08/2022	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	300.000	Pengawas Benih Tanaman Mahir	450.000	-150.000	-2.550.000			- 2.550.000
4	Agustinus Nahak Seran	1804/Kpts/Kp.240/A2/08/2022	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	250.000	Pengawas Benih Tanaman Terampil	360.000	-110.000	-1.870.000			- 1.870.000
5	Alfonsus Bapa Koli	1805/Kpts/Kp.240/A2/08/2022	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	250.000	Pengawas Benih Tanaman Terampil	360.000	-110.000	-1.870.000			- 1.870.000
6	Sumarti	1806/Kpts/Kp.240/A2/08/2022	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	250.000	Pengawas Benih Tanaman Terampil	360.000	-110.000	-1.870.000			- 1.870.000
7	Dionisius Bria	1807/Kpts/Kp.240/A2/08/2022	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	250.000	Pengaws Bibit Ternak Terampil	360.000	-110.000	-1.870.000			- 1.870.000
Jumlah				1.300.000		1.890.000	-590.000	-10.030.000			- 10.030.000




CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian		Disusun oleh/Tanggal	Anggil Krisma, SE, MM 24 Januari 2024	
Inspektorat Jenderal		Direviu oleh/Tanggal	Rio Caesarion, SE, MP 24 Januari 2024	
		Direviu oleh/Tanggal	R A Amperawati, SE 24 Januari 2024	
		Disetujui oleh/Tanggal	Ir. Agus Triwibowo, MM 24 Januari 2024	
UAPA	018	Kementerian Pertanian		
UAPPA-E1	09	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian		
UAPPA-W	2400	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
UAKPA	567783	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Uraian Catatan Hasil Reviu				Indeks KKR
A	Penyelenggaraan Akuntansi			
	Penyelenggaraan akuntansi telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah didukung dengan sarana yang memadai.			
B	Penyajian LK:			
	1. LRA			KKR LRA
	Pendapatan senilai Rp261.398.262,00 atau sebesar 94% dari target senilai Rp277.500.000,00 dan telah sesuai dengan nilai diterima dari entitas lain, telah didukung dengan LPJ bendahara penerima			
	Realisasi belanja senilai Rp11.897.570.392,00 atau 98% dari target Rp12.192.167.000,00 telah sesuai dengan nilai ditagihkan ke entitas lain, namun SHR dengan KPPN belum terbit.			
	Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kurang lebih senilai Rp26.605.000,00 dikarenakan adanya perubahan jabatan dari Jabatan Fungsional Litbangjirap menjadi fungsional lainnya			
	2. Neraca			KKR Neraca
	Terdapat saldo Kas Dibendahara Pengeluaran senilai Rp0,00 dan telah sesuai dengan LPJ bendahara Pengeluaran			
	Terdapat saldo kas lainnya setara kas -Rp7.741.362,00 merupakan pajak yang telah disetor oleh Bendahara Pengeluaran pada bulan Desember 2023, namun baru dilakukan pencatatan di SAKTI pada bulan Januari 2024 dan akan dilakukan perbaikan pada periode 13.			
	Terdapat saldo Persediaan senilai Rp1.200.000,00 telah sesuai dengan BA stok opname persediaan.			
	Terdapat aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp15.577.000,00 dan JIJ senilai Rp56.296.000,00 dalam kondisi rusak berat, namun belum direklas ke akun aset lain-lain.			
	Terdapat tanah sebanyak 2 bidang seluas 1.000 M ² Belum didukung dengan sertipikat tanah.			
	Terdapat tanah seluas 76 993 M ² sertipikat masih atas nama Departemen Pertanian yang sebagian dikuasa masyarakat.			
	Terdapat aset lain-lain senilai Rp393.152.478,00 yang telah diproses penghapusannya senilai Rp55.969 000,00, sedangkan sisanya senilai Rp337.183.478,00 belum diproses penghapusan			
	Terdapat aset belum ditetapkan status penggunaannya senilai Rp23.519.087.904,00 terdiri dari Tanah senilai Rp1.545.722.000,00, Peralatan dan mesin senilai Rp4880.027.686,00, Gedung dan bangunan senilai Rp15.132.987.303,00 dan Jalan, Irigasi dan jaringan senilai Rp1.954.235.915,00			
	Terdapat kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 1 unit tidak ada BPKB.			
	Terdapat kekurangan pembayaran tunjangan jabatan senilai Rp10.030 000,00 dikarenakan adanya perubahan jabatan dari Jabatan Fungsional Litbangjirap menjadi fungsional lainnya, namun belum dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga			

3. LO	KKR LO
LO telah sesuai	
4. LPE	KKR LPE
LPE telah sesuai	
5. CALK & CLBMM	KKR CLBMM
Penjelasan kondisi barang peralatan dan mesin belum sesuai dengan rincian per jenis peralatan dan mesin	

Rekomendasi

1	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan sertifikasi tanah seluas 1.000 M ² .
2	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan pengembalian hak tanah yang dikuasai masyarakat
3	Memproses penghapusan aset lain-lain senilai Rp337.183.478,00
4	Memproses penetapan status penggunaannya terhadap aset senilai Rp23.519.087.904,00
5	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi kendaraan bermotor dengan BPKB
6	Melakukan koreksi perbaikan terhadap saldo kas lainnya setara kas -Rp7.741.362,00
7	Memperbaiki CaLBMM
8	Memastikan nilai kelebihan pembayaran tunjangan jabatan dan selanjutnya dicatat ke Neraca Akun aset Lancar Piutang Lainnya
9	Menginstruksikan kepada masing-masing-pegawai yang kelebihan pembayaran tunjangan jabatan untuk segera menyetorkan ke Kas Negara
10	Mencatat kekurangan pembayaran tunjangan jabatan ke akun neraca utang kepada pihak ketiga

PEREVIU	PETUGAS GLP	PETUGAS BMN
		
Anggil Krisma, SE, MM	Andi Kharisma Pribadi	Herianto Pardosi